

**POLA PENGAWASAN BANK UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh
RESKI ADIJAYA
105010101111016



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **POLA PENGAWASAN BANK UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Identitas Penulis :

- a. Nama** : **Reski Adijaya**
b. NIM : **105010101111016**
c. Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka waktu penelitian : 1 bulan

|Disetujui pada tanggal : 17 Oktober 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., MM

NIP. 19660622 199002 2 001

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn

NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Djumikasih, S.H., MH

NIP. 19721130 199802 2 001

Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi
Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Adijaya

NIM : 105010101111016

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi/Artikel Ilmiah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Ryalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

POLA PENGAWASAN BANK UMUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalty Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang

Pada tanggal : 17 Oktober 2014

Yang menyatakan,

(Reski Adijaya)

POLA PENGAWASAN BANK UMUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN

Reski Adijaya, Ibu Siti Hamidah, SH.,MM, Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.,
M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: 105010101111016@mail.ub.ac.id

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai: Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; Pelaksana kebijakan moneter; Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Financial Services Authority of Indonesia (OJK) is the Indonesian government agency that regulates and supervises the financial services sector. The OJK, is an autonomous agency designed to be free from interference, its functions, duties, and powers include regulation, supervision, inspection, and investigation. The agency was created in 2011 under by Act No. 21 of 2011 which organized system of regulation and supervision of financial services. The primary focus of banking regulation and supervision is to ensure the optimum functioning of Indonesia's banking system as: An institution of public trust in respect of funding and disbursement of funds; An institution for implementation of monetary policy; An institution contributing to economic growth and equity.

Keywords: *Financial Services Authority of Indonesia, OJK, regulation, supervision,, Act No. 21 of 2011, banking*

PENDAHULUAN

Mencapai pengawasan yang efektif memang tidak mudah, terutama jika dikaitkan dengan pengawasan bank yang sistemik. Menyadari pentingnya mencapai suatu pengawasan yang efektif, Pemerintah berupaya untuk melakukan peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan. Upaya untuk mencapai pengawasan perbankan yang efektif terutama dengan terintegrasinya pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia terus dilakukan. Bank Indonesia memandang perlu menyempurnakan sistem pengawasan yang berlaku.

Strategi dan metode dasar pengawasan bank yang dijalankan Bank Indonesia masih belum mampu menciptakan perlindungan optimal dan meminimalkan risiko krisis perbankan. Sikap yang ditempuh oleh Indonesia ialah yang semula menempatkan fungsi pengawasan bank dalam fungsi bank sentral, kemudian melakukan pemisahan, sehingga otoritas pengawasan bank dilakukan oleh suatu badan tersendiri, yakni Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan telah dilakukannya pengalihan pengawasan bank, maka perlu diketahui penyempurnaan maupun penyesuaian pola pengawasan bank yang saat ini digunakan di Bank Indonesia untuk diterapkan di OJK. Sehingga diambilah judul penelitian Analisis Yuridis Pola Pengawasan Bank Umum Pasca Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jangan sampai muncul kesalahan relevansi dan ambiguitas penalaran bahwa dengan adanya otoritas pengawasan perbankan yang baru hanya memunculkan wujud potensi konflik baru, dengan argumen, memindahkan otoritas pengaturan dan pengawasan mikroprudensial perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan hanya mengubah level organisasi pengawas, dari yang semula oleh Bank Indonesia, menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Yang lebih penting ialah memahami kelemahan suatu sistem yang akan diadopsi oleh otoritas perbankan Indonesia atau seberapa pantas dan layak sistem itu menjawab permasalahan ekonomi spesifik suatu Negara.

MASALAH

Bagaimana pola pengawasan bank umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menjelaskan pengawasan perbankan dengan mengacu pada hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pendekatan yang dipergunakan ialah *historical approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Pendekatan sejarah hukum dilakukan dengan menelaah latar belakang, perkembangan pengetahuan mengenai isu yang dihadapi oleh perancang suatu peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan, pendekatan *conceptual approach* dan *analytical approach* dipergunakan untuk melengkapi pemahaman peneliti agar dapat memperoleh pemahaman yang utuh.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan memanfaatkan catatan sistem kartu dan aplikasi Evernote. Catatan sistem kartu merupakan catatan yang memperhatikan tata urutan merujuk sebuah buku. Secara berurutan format dari atas berupa identitas penulis, judul buku, subjek yang dicatat, dan terakhir sumber pada halaman berapa yang disalin. Hal ini merupakan

langkah penting dalam pengumpulan pustaka untuk menghindari plagiasi dalam penelitian sekaligus upaya peneliti dalam menghargai pemikiran orang lain.

Analisis bahan hukum dalam penelitian memanfaatkan 3 interpretasi hukum. Pertama, interpretasi sistematis untuk menafsirkan suatu rumusan norma hukum dengan melihat hubungan antar bagian atau rumusan yang satu dengan yang lain sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Penafsiran tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemahaman akan norma yang ada dalam rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan, contoh yang dapat disampaikan ialah PBI yang menjabarkan kewenangan makroprudensial jika dihubungkan dengan penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, yakni penafsiran teleologis ditujukan untuk menafsirkan rumusan norma dalam Undang-Undang tentang OJK yang untuk diselaraskan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Ketiga, penafsiran historis dengan menyimak latar belakang sejarah hukum dari keberlakuan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Masih tingginya dominasi perbankan dalam sistem keuangan Indonesia menyebabkan stabilitas institusi perbankan menjadi sangat penting dalam penilaian stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.¹ Perbankan menguasai 77,9% komposisi aset lembaga keuangan tahun 2012 untuk data pada Kajian Sistem Keuangan 2013. Hal ini yang ternyata mengalami peningkatan pada 2013 menjadi 78,8% meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 77.9%.

Selama tahun 2011 dan 2012, Bank Indonesia telah menetapkan arah kebijakan yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kebijakan untuk mendorong peran intermediasi perbankan
- b. Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan perbankan
- c. Kebijakan untuk meningkatkan daya saing perbankan dan stabilitas sistem keuangan
- d. Kebijakan untuk penguatan fungsi pengawasan
- e. Penguatan kebijakan makroprudensial

¹ Bank Indonesia, **Kajian Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) No. 21**, Jakarta, Departemen Kebijakan Makroprudensial, 2013, hlm 9.

Dari kesemuanya, untuk kebijakan penguatan fungsi pengawasan ditujukan demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan bank, terutama dalam hal *early warning system*. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan ketentuan terkait pelaporan Bank kepada Bank Indonesia. Sementara itu dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan bank, maka melalui peraturan Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan memberikan batas waktu untuk setiap status pengawasan bank.

Proses pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dalam praktiknya bersifat langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ke bank yang bersangkutan. Berdasarkan pada Undang-Undang tentang Perbankan terdapat kewajiban bagi Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan langsung secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali untuk setiap bank. Pengawasan langsung tersebut dilakukan menggunakan metode *risk based method* dan dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi keuangan bank, memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, dan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada bank.

Sementara itu, pemeriksaan tidak langsung adalah pemantauan seluruh kegiatan operasional bank, yang dilakukan melalui analisis evaluasi terhadap seluruh laporan yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Laporan bank tersebut disampaikan secara berkala (harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan) yang mencakup seluruh aktivitas bank antara lain berupa Rencana Bisnis Bank dan Laporan Keuangan.

Tuntutan perubahan kebijakan perbankan yang ada di Indonesia dapat dikategorikan dalam 2 bagian, yakni pengaruh secara eksternal dan pengaruh secara internal. Secara eksternal, *Global Financial Crisis* (GFC) mendorong meluasnya dampak krisis akibat hubungan saling terkaityang disebabkan kegagalan kebijakan makro, kegagalanpasar, dan kegagalan regulasi. FSB (*Financial Supervisory Board*) menekankan pentingnya kebijakan yang mampu mencegah munculnya risiko sistemik. Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran(*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).

Secara internal, perubahan kebijakan perbankan dikaitkan dengan peran Bank Indonesia dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Perubahan signifikan atas struktur otoritas pengawasan lembaga keuangan di Indonesia yakni sebagai akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang membawa perubahan atas tujuan dan tugas Bank Indonesia. Hal tersebut juga melihat pada apa yang terjadi pada pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis 1998.

Guna mendorong tercapainya perbankan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, OJK telah menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*). Pelaksanaan pengawasan terintegrasi di OJK dilaksanakan secara bertahap. Kerangka pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko disusun secara bertahap meliputi tahapan-tahapan pengawasan

yaitu pemahaman terhadap konglomerasi keuangan, penilaian risiko dan tingkat konglomerasi keuangan, perencanaan pengawasan, koordinasi pemeriksaan, pengkinian profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan, dan tindakan pengawasan dan pemantauan.

Tahapan-tahapan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Dewan Komisiner No. 1/PDK.03/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan yang merupakan landasan utama arah pengembangan Pengawasan Terintegrasi yang dilakukan di OJK.

Terkait dengan kesehatan bank, sejak 2011 Bank Indonesia telah menyempurnakan penilaian tingkat kesehatan dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) menggantikan *CAMELS Rating System*. Pelaksanaan RBBR didasarkan pada 4 faktor yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas dan Permodalan. Selanjutnya, guna melengkapi pengawasan berbasis risiko, bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak diterapkan pengawasan secara konsolidasi (*Condolidated Supervision*). Sebagai *first line of defense*, Bank Indonesia melaksanakan seleksi dalam bentuk uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap pihak-pihak yang mempunyai pengaruh besar dalam pengelolaan bank, yaitu calon dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham pengendali (PSP). Dalam melaksanakan perpindahan sebagai wewenang yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam masa transisi ke OJK, diupayakan tidak terdapat perubahan signifikan sehingga menghindari terjadinya penyesuaian yang menyulitkan kondisi perbankan nasional. Pendekatan berbasis risiko ini menggunakan strategi dan metodologi

berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank mendeteksi risiko yang signifikan pada aktivitas bisnis bank yang diawasinya secara dini, dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, status pengawasan bank terdiri dari normal, intensif, dan khusus. Dalam mengawasi bank, Bank Indonesia menggunakan pendekatan pengawasan bank berdasarkan risiko. Pendekatan ini menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank mendeteksi risiko yang signifikan pada aktivitas bisnis bank yang diawasi secara dini, serta mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dibentuk Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko yang akan menghasilkan rekomendasi dan penilaian terhadap hasil pengawasan bank. Forum Panel dilakukan dalam dua tahap siklus RBS yakni melalui Penilaian Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank, serta tahap Tindakan Pengawasan dan Monitoring. Meskipun penerapan kedua sistem tersebut memadai untuk mendukung pengawasan bank berdasarkan risiko, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan sistem yang berlaku.

Pengawasan bank oleh bank Indonesia yang kemudian diterapkan oleh OJK dilaksanakan dalam kegiatan *on site examination* (Pemeriksaan) maupun *off site supervision* (pengawasan). Setiap bulan Bank Indonesia melakukan analisis terhadap kondisi keuangan dan likuiditas manajemen untuk memastikan apakah terdapat perubahan terhadap penilaian di posisi akhir semester tersebut. Dari hasil kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan-laporan dan kondisi di

internal bank, Bank Indonesia menyusun posisi penilaian tingkat kesehatan final. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup seluruh kegiatan dan kualitas manajemen bank. Hal tersebut bertujuan guna memastikan bank beroperasi secara berhati-hati, sehat, dan efisien. Mencermati adanya tekanan di pasar keuangan global dan domestik yang, Bank Indonesia tetap memberikan perhatian terhadap kondisi likuiditas perbankan. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan pemantauan likuiditas bank secara harian dan mendorong manajemen bank untuk menjaga kestabilan likuiditas banknya. Dalam melakukan *supervisory action* tersebut, Bank Indonesia tidak menerapkan pendekatan *one size fit all* kepada seluruh bank. Bank Indonesia menggunakan pendekatan *bank specific* dan *case by case basis* berdasarkan parameter tertentu, karakteristik bisnis bank, target pasar, likuiditas, rentabilitas, dan *economic of scale* dari masing-masing bank.

Sebagai upaya *quality assurance* terhadap sistem pengawasan perbankan, Bank Indonesia secara rutin menyelenggarakan Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko yang dilaksanakan dua kali dalam setahun setiap semester. Forum tersebut diadakan sebagai media *check and balance* oleh pihak ahli yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk memastikan *governance, compliance, procedural, dan competency* dari proses pengawasan bank. Melalui forum tersebut, rekomendasi yang diberikan oleh para ahli digunakan untuk melengkapi dan memperkaya proses pengawasan bank.

Setelah OJK terbentuk, Bank Indonesia fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan, antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Tugas dan

wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek mikroprudensial seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan.

Sementara itu, aspek makroprudensial berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT), dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter Bank Indonesia.

Kebijakan makroprudensial akan fokus pada kebijakan sistem keuangan secara keseluruhan dan fokus pada risiko secara agregat, misalnya terkait dengan perubahan perilaku institusi keuangan secara kolektif. Pasca terbentuknya OJK, tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak lagi mencakup tugas pengaturan dan pengawasan bank. Bank Indonesia akan bertugas dalam menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Meskipun tugas pengawasan perbankan diambil alih oleh OJK, peran dan manfaat Bank Indonesia di masyarakat tidak akan berkurang. Tugas Bank Indonesia tidak lagi mengawasi individual bank. Namun demikian, aspek makroprudensial tetap berada di Bank Indonesia yakni pengawasan terhadap risiko sistemik pada sistem keuangan.

Bank Indonesia mengupayakan tidak terdapat perubahan yang signifikan mengenai pendekatan/metode/sistem pengawasan bank dan struktur organisasi pengawasan bank. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gangguan pada sistem perbankan atau sistem keuangan termasuk internal pengawasan bank. Di

bidang pengaturan, seluruh Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Ekstern (SE BI), dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Ekstern (SK DIR) di bidang perbankan telah dikompilasi oleh Bank Indonesia. Kompilasi termasuk perizinan yang dinyatakan masih berlaku di OJK sampai dengan dilakukannya perubahan/pencabutan, oleh OJK. Di bidang pertukaran data dan informasi, Bank Indonesia dan OJK telah menyepakati untuk dapat saling mengakses secara penuh terhadap data/informasi dan sistem pelaporan Lembaga Jasa Keuangan. Di bidang logistik, Bank Indonesia telah meminjampakaikan gedung/ruangan di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jakarta untuk tempat kerja sebagian pegawai di *shared function* OJK yakni di bidang audit, edukasi dan perlindungan konsumen dan pengawasan perbankan. Selain itu, bank Indonesia juga meminjampakaikan sebagian ruangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah untuk operasional kegiatan OJK. Kesemua hal tersebut menunjukkan bahwa OJK masih belum memiliki independensi operasional yang penuh.

PENUTUP

Upaya perbaikan terhadap pola pengawasan bank umum mensyaratkan penilaian obyektif atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Otoritas Pengawas Perbankan terdahulu. Pola pengawasan perbankan di Indonesia pra OJK memiliki kelemahan yang kemudian diperbaiki dalam masa pengawasan yang sama oleh Bank Indonesia mendekati masa peralihannya ke OJK. Perbaikan yang telah dilakukan dengan mengacu pada *The Core Principle for the Effective Banking Supervision* ternyata masih belum dilaksanakan secara optimal oleh OJK dengan tidak menerapkan kesemua 29 Prinsip Pengawasan Bank yang Efektif, utamanya dalam hal keindependensiannya. Untuk menentukan independensi suatu lembaga pengawas, digunakan empat dimensi yang menjadi alat ukur independensi, yaitu regulasi, supervisi, institusi, dan anggaran. Dari empat

dimensi tersebut ternyata independensi regulasi dan bidang operasional belum optimal.

Dalam mengalihkan tugas pengawasan bank, Bank Indonesia berupaya agar tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap pendekatan/sistem/metodologi pengawasan bank dan struktur organisasi pengawasan bank. Hal ini untuk menghindari terjadinya gangguan pada sistem perbankan. Yang patut menjadi perhatian dalam perbaikan pendekatan pengawasan yang dilaksanakan pasca peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank Umum dengan adanya keberlakuan Undang-Undang tentang OJK ialah pendekatan *one size fit for all* kepada seluruh bank tidak lagi dipergunakan. OJK menggunakan pendekatan *bank spesifik* dan *case by case basis* berdasarkan parameter tertentu, karakteristik bisnis bank, target pasar, likuiditas, rentabilitas, dan *economic scale* dari masing-masing bank. Sehingga upaya perbaikan dan penyempurnaan pola pengawasan bank umum sebagai bentuk fleksibilitas dalam penyesuaian terhadap profil risiko per individu bank untuk mencegah dan menangani krisis terus dilakukan. Bank Indonesia memang telah menyempurnakan *System Operational and Procedure* (SOP) Pengawasan dan Perizinan Bank Umum yang akan menjadi pedoman bagi OJK. Namun hal tersebut belum cukup jika di bidang pengaturan OJK masih menggunakan seluruh peraturan dan ketentuan perbankan termasuk perijinan yang dinyatakan masih berlaku oleh BI di OJK. Memang, pengawasan terintegrasi akan melengkapi pengawasan yang sudah ada dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengawasan yang telah diterapkan secara spesifik terhadap masing-masing sektor industri jasa keuangan, termasuk pengawasan terhadap industri Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Prasentyantoko, **Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang Publik**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
- Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan**, RAS, Jakarta, 2014
- Ahmad Watik Pratiknya, **Pandangan dan Langkah Reformasi B.J Habibie**, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1999

- Andrea Ata Ujan, **Filsafat Hukum Membangun Hukum Membela Keadilan**, Kanisius, Yogyakarta, 2009
- Bank Indonesia, **Kajian Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) No. 21**, Jakarta, Departemen Kebijakan Makroprudensial, 2013
- Bank Indonesia, **Laporan Pengawasan Perbankan 2012**, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jakarta, 2013
- Bank Indonesia, **Laporan Pengawasan Perbankan 2011**, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jakarta, 2012
- Dias Satria, **Ekonomi, Uang, dan Bank (Catatan Teoritis dan Praktis)**, UB Press, Malang, 2009
- G. Kaufman, ***Bank Runs: Causes, Benefits, and Costs***, Cato Journal 2, No. 3, Cato Institute, Massachusetts, 1988
- HLB Hadori & Rekan bekerja sama dengan *Law Office Soehandjono & Associates*, **BI dan BLBI: Suatu Tinjauan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum**, Bank Indonesia, Jakarta 2002
- Humas Bank Indonesia, **Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia**, Bank Indonesia, Jakarta, 2010
- Husein Umar, ***Bussiness an Introduction: Sebuah Buku yang akan Menuntun Anda untuk Memahami dan Memasuki Dunia Bisnis dengan Segala Aspek, Kegiatan, Permasalahan, Pengelolaan, dan Pengembangannya***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Irsyad Lubis, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, USU Press, Medan, 2010
- KrisnaWijaya, **Analisis Kebijakan Perbankan Nasional**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Kwik Kia Gie, **Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Norman A. Hart dan John Stapleton, **Kamus Marketing**, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Otoritas Jasa Keuangan, **Statistik Perbankan Indonesia**, Vol. 12 No. 8, Juli 2014, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta, 2014
- R.J. Shock, ***Wall Street Dictionary [Kamus Lengkap Keuangan Wallstreet]***, Erlangga, Jakarta, 2002

Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Rudjito dkk (Tim Penyusun), **5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan**, Jakarta, Lembaga Penjamin Simpanan, 2011

Sjamsul Arifin, R. Winantyo, dan Yati Kurniati, **Integrasi Keuangan dan Moneter: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007

Sofyan S. Harahap, **Pelajaran dari Krisis Asia**, Pustaka Quantum, Jakarta, 2002

T. Gilarso, **Pengantar Ilmu Ekonomi Makro**, Kanisius, Yogyakarta, 2004

JURNAL:

Sri Ayomi dan Bambang Hermanto, **Mengukur Risiko Sistemik dan Keterkaitan Finansial Perbankan di Indonesia**, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 16, 2 Oktober 2013

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, **Buletin Ekonomi dan Moneter**, Volume 16 No. 3, Januari 2014

MAJALAH:

Agus Sugiarto, **Pengawasan yang Terintegrasi Menjadi Sesuatu yang Fundamental bagi OJK**, Majalah Edukasi Konsumen, Edisi April 2014

Anonim, **Issues 321-324**, Majalah Eksekutif, 2006

Tim Edukasi dan Perlindungan Konsumen, **Mengenal Apa dan Bagaimana Organisasi OJK**, Majalah Edukasi Konsumen, Edisi 1, 2013

INTERNET:

Alfredo Zebua, 2012, **Analisis Risiko Sistemik Perbankan Indonesia** (*online*), <http://>, (16 oktober 2014)

Bank for International Settlement 2011, **Consultative Document: Core Principles for Effective Banking Supervision** (*online*), <http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm>, (10 Oktober 2014), 2012.

- Harry Koot, 2012, **Analisis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan** (*online*), [http:// ebookbrowse.net/ringkasan-skripsi-harry-koot-pdf-d346730420](http://ebookbrowse.net/ringkasan-skripsi-harry-koot-pdf-d346730420), (10 September 2014)
- Retta Christina Sinaga, 2013, **Aspek Hukum Pengalihan Pengawasan Perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** (*online*), <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8793?show=full>, (10 September 2014)
- U.S Department of Housing and Urban Development, ***Subprime Lending*** (*online*), http://portal.hud.gov/hudportal/HUD/src=program_office/fair_housing_equal_opp/lending/subprime, (10 September 2014), 2014.

SKRIPSI:

- Dian Putriana, **Analisa Perbandingan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pergerakan Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika saat Terjadi Krisis Moneter 1998 dan saat Terjadi Krisis Finansial 2008**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional

Peraturan Bank Indonesia No. 14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank

Peraturan Dewan Komisiner No. 1/PDK.03/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.14/75/KEP.GBI/2012 tanggal 25 Oktober 2012

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.14/7/KEP.GBI/2012 tanggal 22 Februari 2012

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/108/KEP.GBI/2011 tanggal 29 Desember 2011

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/102/KEP.GBI/2011 tanggal 12 Desember 2011

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/91A/KEP.GBI/2011 tanggal 17 November 2011

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/32/KEP.GBI/2011 tanggal 10 Mei 2011

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/15/KEP.GBI/2011 tanggal 22 Februari 2011

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/48/KEP.GBI/2011 tanggal 7 Juli 2011

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/86/KEP.GBI/2010 pada tanggal 22 Desember 2010

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Pusat Bank Umum

Surat Edaran No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum